

Judul : Sri Mulyani Memang Pandai Merangkai Angka dan Data
Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 11

Jelaskan Keuangan Negara & Penanganan Pandemi

Sri Mulyani Memang Pandai Merangkai Angka Dan Data

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengaku terhibur dengan penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait laporan kinerja APBN di Tahun 2021 dan penanganan pandemi. Dia pun memuji Sri Mulyani pandai merangkai angka dan data.

"INI memang salah satu keistimewaan Menkeu kita, membuat angka menjadi cerita, membuat data menjadi makna," kata Hendrawan membuka sesi tanya jawab dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani, lanjutnya, telah memberi penjelasan detail mengenai efektivitas keuangan negara dalam pertumbuhan perekonomian negara dan kinerja APBN Tahun 2021. Penjelasan ini sangat meyakinkan bagi para anggota dewan. Juga membangunkan optimisme bahwa negara bisa keluar dari pandemi yang melanda seluruh dunia ini.

Hanya saja, politisi PDIP ini menilai, optimisme yang dibangun pemerintah ini acap kali melenceng dari target.

"Saya sudah tujuh tahun di Komisi XI dan saya mencatat tidak pernah target pertumbuhan ekonomi kita tercapai. Tidak pernah penerimaan perpajakan kita tercapai," tegas dosen Pascasarjana Universitas Pelita Harapan ini.

Hendrawan khawatir, kondisi ini kemudian menimbulkan ilusi fiskal. Bahwa, pemerintah akan melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan sedemikian

rupa, sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada persepsi atau perilaku tertentu.

"Ini sudah mulai terasa ketika lembaga mitra dan Pemda diturunkan anggarannya, mereka seperti tidak siap," sambung dia.

Hendrawan bilang, laporan keuangan pemerintah yang luar biasa ini kemudian menjadi fenomena, mengingat dampaknya di berbagai daerah sudah mulai terasa.

Jebolan S3 University Amsterdam ini menganalogikan, seseorang merasa pendapatannya naik sehingga secara psikologis membuatnya sulit mengerem belanjanya.

"Itu sebabnya kita kembali ke normal 3 persen mulai APBN 2023. Saya sudah merasa dari sekarang sepertinya dalam tanda petik *mission impossible*. Tapi syukurlah, kita akan berusaha ke arah sana," jelasnya.

Selain itu, politisi senior banteng ini menemukan banyak kepala daerah mengeluh dengan kebijakan pemerintah yang sering kali melakukan *refocusing* anggaran. Tahun ini saja, pemerintah sudah melakukan empat kali *refocusing* yang akibatnya membuat kepala daerah malah pusing.

"Mereka mengatakan *refocusing* ini dengan 'repusingisasi'.

Jadi pusing. Mereka mengatakan program kami tidak bisa dijalankan," katanya.

Tidak sampai di situ, banyak daerah juga pusing dengan adanya beban pelaporan keuangan tambahan seperti pengisian *platform* aplikasi yang seringkali berubah. Kondisi ini yang kemudian membuat perekonomian di daerah tidak bergerak.

"Seperti yang dikatakan Ibu Ani (Sri Mulyani), APBN-APBD menjadi tidak fungsional. Padahal itu yang tanda petik satu-satunya yang diharapkan dalam kondisi seperti saat ini," katanya.

Sementara, Sri Mulyani menjelaskan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan seluruh dunia mengalami pukulan. Begitu pun dengan pemerintah yang juga sempat mengalami pukulan pada kuartal II tahun lalu, lantaran semua kegiatan berhenti akibat pandemi.

"Dalam hal ini pemerintah juga langsung melakukan perubahan APBN," katanya.

Dijelaskannya, pukulan ekonomi di kuartal II tahun lalu terjadi karena pemerintah belum siap memompa belanja akibat kontraksi yang sangat mendadak di situasi pandemi.

Terlebih di periode April-Mei, menjadi bulan-bulan terberat di seluruh dunia. Seluruh negara tidak siap bahkan harus mengambil kebijakan *lockdown*.

Menurut Sri Mulyani, membaiknya ekonomi menunjukkan bahwa APBN satu-satunya instrumen yang memang ada di garis depan. ■ KAL



Speaker Quote

"Ini momentum baik yang harus direspons dengan hati-hati. Penurunan level PPKM di sejumlah daerah akan memberi kesempatan pergerakan ekonomi di berbagai sektor. Akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional."

■ Ketua DPR, Puan Maharani